

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DI KOTA GORONTALO**

Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta

NPP. 29.1558

*Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: indahsari418@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). The author focuses on the problem of low reading culture and the lack of awareness of the village community towards sub district literacy activities. **Purpose:** This study aims to know the participation of youth in the Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District. **Method:** This study uses mixed methods and analysis of the participation stage according to Yadav Theory . The technique of collecting data are done by survey (50 respondent), interviews (7 informant), and documentation. **Result:** The findings are youth participation in planning is adequate, implementation and utilization of results are quite good, although it is still constrained by the preoccupation of youth and the low level of awareness of some youth. **Conclusion:** Youth participation the Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District has been going well because of the synergy of the local government and its youth community. In order to increase youth participation, it is recommended to optimize information technology, social media and collaborate with various components including entrepreneurs.

**Keywords:** Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat ialah gambaran sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat salah satunya di Kota Gorontalo sendiri. Ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat yang terjadi di Kota Gorontalo seperti pelanggaran hewan lepas, pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta pasangan mesum saat razia kosan. Dan yang paling sering ditemukan di

Kota Gorontalo adalah pelanggaran terkait dengan peredaran minuman beralkohol serta pasangan mesum saat razia kosan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Gorontalo. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi dilapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo belum efektif. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi contohnya banyaknya faktor penghambat yang ditemukan pada saat penelitian.

**Kata kunci:** ketertiban, ketenteraman, efektivitas, Satpol PP

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketertiban umum serta ketenteraman warga ialah gambaran sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Kondisi ketertiban umum, ketenteraman, serta keamanan yang kondusif ialah modal utama yang dibutuhkan guna menunjang kesuksesan pembangunan sebuah daerah supaya tercapainya good governance.

Agar tercipta sistem pemerintahan yang baik atau sering dikatakan good governance yang jauh dari berbagai pelanggaran serta perbuatan tidak tertib semua lini pemerintahan dalam perihal ini pemerintah daerah serta semua aspek yang ada didalamnya mampu bergerak secara selaras agar melahirkan suatu progress nyata serta inovasi baru dari pemerintah daerah dan tindakan yang sedikit tegas diikuti oleh niat yang ikhlas murni guna melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Salah satu organisasi perangkat daerah yang menjadi penggerak terwujudnya ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di sebuah daerah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga khusus yang berperan guna mendukung terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah. Dapat dilihat langsung Satuan Polisi Pamong Praja ialah unsur penting didalam upaya implementasi peraturan daerah serta penegakannya didalam kehidupan masyarakat, sekaligus membantu didalam menindak seluruh bentuk penyelewengan didalam konteks daerah.

Keberadaan Instansi pemerintah Kota didalam perihal ini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut guna bekerja secara profesional didalam menangani pelanggaran-pelanggaran mengenai keamanan serta ketertiban yang terjadi di Kota Gorontalo. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menegaskan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan “Perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman warga sebagai pelaksana tugas desentralisasi”.

Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman warga di Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara langsung bersama Bapak Moh Kurniawan Hadjarati S.STP sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo mengatakan bahwasanya ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman warga seperti pelanggaran hewan lepas, pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima, minuman beralkohol, pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, gelandangan serta pengemis dan anak jalanan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul fokus penelitian **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA GORONTALO”**.

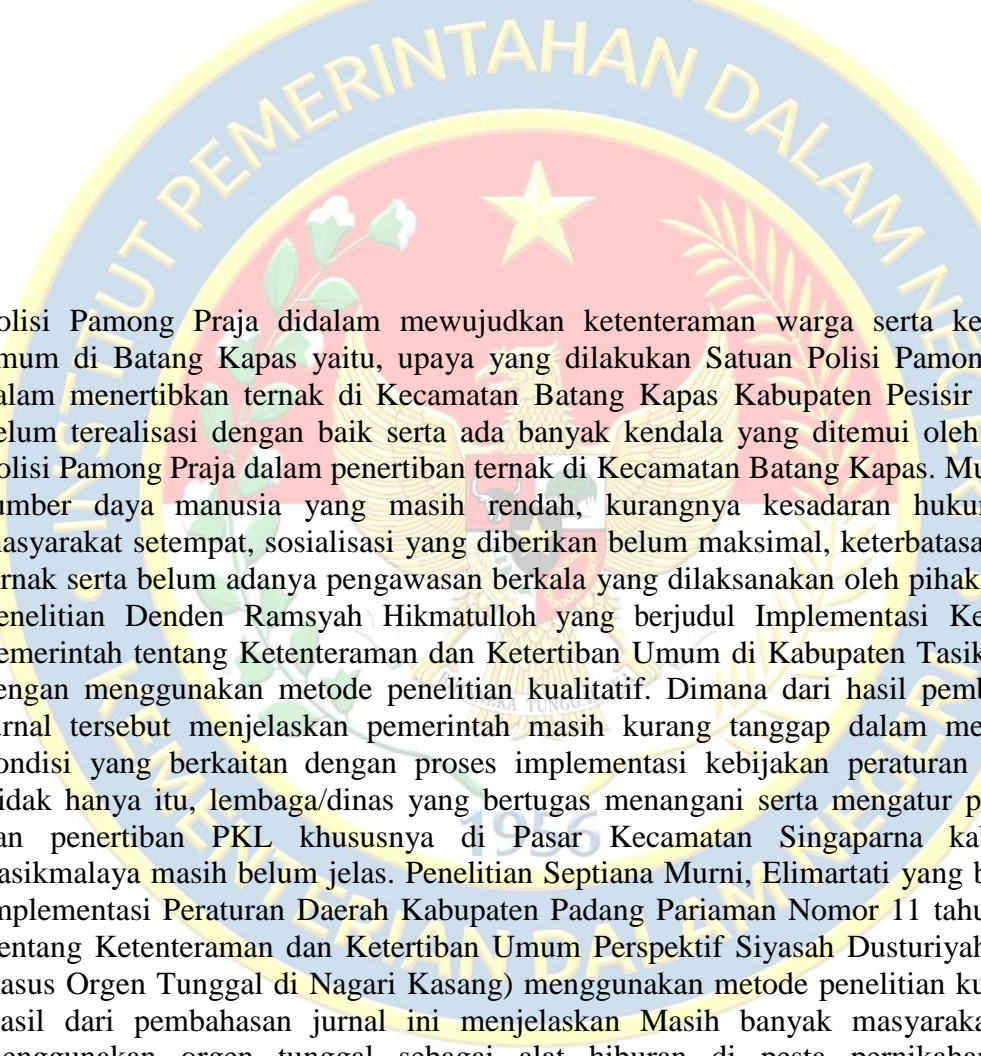
### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa masalah yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP di Kota Gorontalo. Sudah ditetapkan suatu aturan guna mengatur segala pelanggaran yang ada, namun fakta dilapangan masih banyak ditemukan kasuspelanggaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Instrumen pengaturan tersebut merupakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 1 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum. Bahkan supaya pelaksanaan perda tersebut maksimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo didalam pelaksanaantugas serta fungsinya membentuk suatu tim operasi/razia yang di namakan “razia pekat” atau razia penyakit warga yang ialah suatu wujud dari program penegakan produk hukum daerah. didalam seminggu tim tersebut sering melakukan razia rutin yang diagendakan masing-masing rabu serta sabtu malam. Dari masalah tersebut mampu ditinjau bahwasanya sering dilakukannya operasi/razia rutin dari Satuan Polisi Pamong Praja tetap saja jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum serta ketenteraman warga masih saja meningkat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan 3 jurnal yang telah dipublikasikan dan terakrediasi sebagai pembanding dalam penelitian yang peneliti lakukan . Dimana terdapat kesamaan dalam dari ketiga jurnal tersebut yaitu membahas mengenai penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar yang berjudul Upaya Satuan Polisi Pamong Praja didalam Mewujudkan Ketenteraman warga serta Ketertiban Umum di Batang Kapas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana dari hasil pembahasan jurnal tersebut mengenai upaya Satuan



Polisi Pamong Praja didalam mewujudkan ketenteraman warga serta ketertiban umum di Batang Kapas yaitu, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan ternak di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan belum terealisasi dengan baik serta ada banyak kendala yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban ternak di Kecamatan Batang Kapas. Mulai dari sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat setempat, sosialisasi yang diberikan belum maksimal, keterbatasan lahan ternak serta belum adanya pengawasan berkala yang dilaksanakan oleh pihak terkait. Penelitian Denden Ramsyah Hikmatulloh yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dari hasil pembahasan jurnal tersebut menjelaskan pemerintah masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan peraturan daerah. Tidak hanya itu, lembaga/dinas yang bertugas menangani serta mengatur penataan dan penertiban PKL khususnya di Pasar Kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya masih belum jelas. Penelitian Septiana Murni, Elimartati yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang) menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari pembahasan jurnal ini menjelaskan Masih banyak masyarakat yang menggunakan orgen tunggal sebagai alat hiburan di pesta pernikahan yang penggunaannya melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam Peraturan Daerah. mampu disimpulkan warga setempat tidak taat atas peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebab kurangnya penyampaian sosiaisasi langsung teruntuk masyarakat.

#### **1.4 Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari waktu dan tempat penelitian yang berbeda, fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisis efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP. Fokus dalam penelitian ini tepatnya kepada efektif tidaknya pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo, hambatan yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengolah data yang didapatkan dari Satpol PP maupun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang dikaitkan dengan teori dan fenomena permasalahan. Peneliti memfokuskan terhadap efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2007) yang didalamnya terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja, Tanggung Jawab.

#### **3.1.1 Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut. Efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bisa dicapai jika semua anggota organisasi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

##### **3.1.1.1 Pencapaian Target**

Pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo semestinya patut menunjukkan pencapaian target dan tujuan secara tepat dan optimal, utamanya bagi aparat yang tidak lain merupakan pelaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dalam pencapaian target dan tujuan ada sebuah program yang dicetuskan sebagai tolak ukur untuk mencapai sebuah tujuan. Pencapaian target dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang mempunyai tujuan atau target dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Berlandaskan pada informasi dan keterangan dari informan-informan yang ada dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian target termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang dilampirkan berisi target yang telah tercapai dan terealisasi dengan baik bahkan ada poin yang melampaui target.

Selain itu didukung juga oleh beberapa keterangan hasil wawancara dari informan yang membuktikan bahwa pencapaian target dapat dikatakan cukup baik.

### **3.1.1.2 Kemampuan Adaptasi**

Adaptasi ialah kemampuan sebuah organisasi supaya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi. Dilihat dari faktor internal organisasi yaitu sumber daya manusia.

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan langsung dari informan dapat disimpulkan bahwa internal organisasi terkait dengan sumber daya manusia digolongkan dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat langsung bahwa banyak anggota Satpol PP yang didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat kinerjanya bisa diandalkan dengan baik. Hal tersebut digambarkan dengan adanya semangat kerja mereka yang cukup tinggi pada saat bertugas dilapangan. Berbeda dengan aspek yang satunya yaitu sarana dan prasarana yang masih sangat kekurangan. Masalah tersebut harusnya bisa menjadi sorotan dari atasan untuk ditemukan solusi yang tepat mengatasi hal tersebut.

Kemampuan adaptasi tidak hanya dilihat dari internal organisasi namun eksternal organisasi juga masuk kedalamnya. Di lapangan sendiri Satpol PP berhadapan langsung dengan masyarakat yang merupakan objek dari penegakan keamanan dan ketertiban umum serta ada juga instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan Satpol PP seperti TNI/POLRI. Saat pelaksanaan tugas seorang anggota Satpol harus pandai melihat dan membaca situasi yang ada agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar terutama pada saat operasi/razia.

### **3.1.1.3 Kepuasan Kerja**

Kepuasan kerja ialah level kepuasan individu bahwasanya mereka memperoleh imbalan yang setimpal dari bermacam-macam faktor situasi serta kondisi profesi dari organisasi. Dengan melalui tingkat kepuasan kerja mampu dilakukannya evaluasi pada hasil kerja dimana telah efektifkah anggota bekerja dengan pemberian insentif dari pihak organisasi.

Dari berbagai informasi dan fakta yang didapatkan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa motivasi yang dirasakan oleh anggota Satpol PP terkait dengan reward dan insentif masih kurang terlebih lagi yang berasal dari pemerintah kota. Sebagian besar anggota Satpol PP masih mengandalkan usaha dari masing-masing untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya terkait dengan kenyamanan yang dirasakan oleh anggota Satpol PP saat bertugas, dengan mengedepankan sikap persuasif dan humanis serta adanya sikap kooperatif masyarakat maka kondisi dilapangan yang dialami langsung oleh anggota aman terkendali serta tertib sehingga para anggota cukup lancar dalam menjalankan tugasnya.

### **3.1.1.4 Tanggung Jawab**

Tanggung jawab ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu yang merasa memiliki kewajiban terkait dengan tugasnya maupun panggilan hati yakni sikap yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut mempunyai sifat kepedulian serta kejujuran yang sangat tinggi. Pada umumnya, tanggung jawab berkaitan erat dengan disiplin yang menunjukkan sebuah kondisi dimana sikap hormat tertanam didalam diri masing-masing individu terkait dengan kesadaran atas aturan atau peraturan yang berlaku. Jadi, tanggung jawab ialah bentuk kewajiban seseorang guna melakukan tugas yang diberikan dengan baik serta dilaksanakan dengan penuh ketaatan yang ada didalam diri masing-masing individu. Dengan taatnya seseorang atas aturan yang berlaku, maka tanggung jawab tersebut akan timbul dengan sendirinya.

Terkait pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Gorontalo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo membagi anggotanya kedalam tiga regu yang masing-masing regunya terdiri dari beberapa pleton yang dipimpin langsung oleh seorang wirapati dari masing-masing regunya. Dengan adanya pembagian regu tersebut, diharapkan masing-masing anggota Satpol PP Kota Gorontalo mampu melakukan tugas yang diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab yang tinggi.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi/kelompok tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan terdapat faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini juga sama dengan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo. Faktor penghambat merupakan hal yang menjadi pengganggu dan penghambat Satpol PP Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun faktor penghambat Satpol PP dalam penegakan tugasnya yaitu:

#### **3.2.1 Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Gorontalo**

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan salah satunya yaitu kualitas pendidikan anggota Satpol PP. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP yang sebagian besar non PNS atau tenaga honorer bahkan ada dari mereka yang merupakan lulusan SMA.

#### **3.2.2 Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam kondisi baik namun disayangkan jumlahnya yang kurang belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota Satpol PP. Dapat disimpulkan pengadaan kembali perlu dilakukan agar bisa mendukung berjalannya program Satpol PP supaya berjalan optimal dan maksimal.

### **3.3.3 Pelatihan bagi anggota Satpol PP beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan.**

Pelatihan yang harusnya didapatkan oleh anggota Satpol PP sudah lama belum dilaksanakan dikarenakan kurangnya anggaran maka menghambat kegiatan tersebut diselenggarakan. Akibatnya banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai pengetahuan dasar tentang tupoksinya. Berlandaskan pernyataan yang berasal dari informan, peneliti menyimpulkan bahwasanya pembinaan serta pelatihan yang diberikan teruntuk anggota Satpol PP Kota Gorontalo belum optimal. Terbukti dari pelaksanaannya yang beberapa tahun ini belum diselenggarakan dikarenakan situasi serta kondisi yang tidak memungkinkan saat pandemi serta kendala yang umum terjadi berkaitan dengan kurangnya anggaran yang tersedia.

### **3.3.4 Belum ada reward yang berasal dari pemerintah**

Penghargaan yang didapatkan oleh anggota Satpol PP masih sangat minim dan memprihatinkan. Penghargaan atau reward yang diberikan masih berasal dari pimpinan Satpol PP langsung. Penghargaan langsung yang berasal dari pemerintah masih sangat kurang.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang serta belum adanya insentif dan reward yang diperoleh anggota Satpol PP dari pemerintah kota.

b. Faktor-faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Gorontalo
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 3) Pelatihan khusus anggota Satpol PP sudah lama tidak dilaksanakan.
- 4) Penghargaan atau reward yang berasal dari pemerintah masih kurang.

c. Upaya-Upaya Yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo adalah:

a. Mengoptimalkan setiap sarana dan prasarana yang dimiliki dengan cara melakukan giat pemeliharaan rutin terhadap setiap alat khususnya transportasi baik kendaraan roda dua dan roda empat.



b. Tahun 2022 pimpinan berusaha menyelenggarakan kembali kegiatan pembarengan terkait dengan pelatihan khusus yang harusnya didapatkan oleh setiap Anggota Satpol PP Kota Gorontalo jika anggaran memungkinkan.

c. Melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar jumlah pelanggar setiap tahunnya bisa menurun.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini tentu memiliki kekurangan seperti waktu yang sedikit, kendala biaya dan juga masih ada terdapat kekurangan data yang lupa atau belum di lampirkan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih mempunyai kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo Bapak Mohammad Mulky Datau, S.STP, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Tangkilisan, H. N. (2015). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## Sumber Lainnya

<https://edata.gorontaloikota.go.id>